

PENGELOLAAN PASAR SABTU DI KELURAHAN MANGGAHANG (STUDI ETNOGRAFI PADA PASAR MINGGUAN)

Sani Sakinah^{1}, Rina Hermawati¹*

¹Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363.

*Corresponding author: sanisknh213@gmail.com

Abstract *Pasar mingguan seringkali muncul secara spontan di ruang publik dan membutuhkan pengelolaan serta perizinan yang tepat. Pengelolaan pasar melibatkan berbagai aktor dengan peran dan kepentingan yang berbeda, seperti petugas pasar, pedagang, pemilik warung, dan Satpol PP. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan pasar sabtu di Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah dengan menggunakan pendekatan orientasi aktor menurut Norman Long. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi yang melibatkan wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar sabtu mencakup beberapa aspek, seperti pengelolaan perizinan, retribusi, kebersihan, keamanan, dan mobilisasi. Setiap aktor memperjuangkan kepentingannya melalui interaksi dan negosiasi, dengan memanfaatkan posisi sosialnya dalam pengelolaan pasar. Keunikan penelitian ini terletak pada analisis interaksi antar aktor yang mengelola pasar di tingkat lokal, serta bagaimana mekanisme pengelolaan tersebut disesuaikan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika pengelolaan pasar tradisional yang berkembang secara lokal dan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang saling bersinggungan.*

Keyword:

Pasar Mingguan, pengelolaan pasar, orientasi aktor, etnografi, pasar

Article Info

Received : 17 Mar 2025

Accepted : 21 Apr 2025

Published : 05 Jun 2025

1. Pendahuluan

Pasar mingguan sebagai pranata ekonomi yang berisi aturan-aturan, menempati ruang terbuka publik seperti, trotoar, gang-gang permukiman, lapangan, alun-alun, dan sebagainya serta tidak terdata dalam data pasar pemerintah daerah (Geertz, 1963; Aisy, dkk, 2020; Sinaga, 2017). Pasar ini secara transisi menjadi titik utama dalam perkembangan menuju ekonomi masyarakat modern, meskipun tidak bisa mengabaikan kehadiran mereka dalam menunjang perekonomian modern yang sudah ada (Geertz, 1963). Pasar secara ekonomis menjadi ruang

pemberdayaan ekonomi rakyat (Shabraniti, dkk, 2024; Sitoro, 2022; Saputra & Mutakin, 2019) diantaranya sebagai pusat pertukaran barang, perputaran uang daerah, mempermudah aksesibilitas dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan (Thania, dkk, 2020), dan membuka lapangan pekerjaan (Binsar, 2017; Feriyanto, 2006; Nurhadi, 2023). Secara sosial, pasar menjadi tempat untuk membentuk jalinan relasi sosial-ekonomi antar aktor diantaranya petugas pasar, pedagang, pemilik warung, warga, dan Satpol PP. Setiap aktor tersebut memiliki peran dan kepentingannya masing-masing yang perlu dikelola agar pelaksanaan pasar mingguan berjalan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui orientasi aktor dengan membangun kaidah dan aturan melalui proses tertentu yang disesuaikan dengan ide, gagasan, kepentingan para aktor, nilai dan norma atau kebudayaan hidup yang dipegang oleh masyarakat. Pengelolaan pasar mingguan meliputi pengelolaan perizinan, retribusi, hasil keuangan, kebersihan, pedagang, keamanan, mobilitas serta humas yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai petugas pasar mingguan (Styawan & Rahman, 2021).

Meskipun pasar mingguan sering kali menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pengelolaannya sering kali tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak ada pendekatan yang memadai untuk memahami dinamika interaksi antar aktor sebagai wujud dari peran dan kepentingan para aktor. Kepentingan memberikan energi tersendiri bagi para aktor dan secara otomatis berkelindan dengan hubungan sosial yang ada, sehingga dapat menimbulkan benturan yang menghalangi, saling menguatkan ataupun melumpuhkan (Swedberg, 2003). Maka dari itu, dalam pengadaan pasar mingguan, kepentingan para aktor perlu dikelola agar pasar mingguan dapat berjalan tertib dan berkelanjutan. Hal itu dilihat dengan pendekatan orientasi aktor Norman Long dalam konteks *interface* yang mengeksplorasi bagaimana perbedaan kepentingan sosial, interpretasi budaya, pengetahuan dan kekuasaan dimediasi dapat dilanggengkan atau ditransformasikan pada titik-titik kritis hubungan atau konfrontasi (Long, 2001). Sehingga, para aktor berusaha untuk bergulat secara kognitif, emosional dan organisasional dengan situasi bermasalah yang mereka hadapi. Pendekatan orientasi aktor dalam penelitian Lehmann & Gilson (2013) mengeksplorasi pengalaman, kepentingan, dan lokasi spesifik aktor-aktor dalam lanskap sebuah tata kelola atau struktur. Pada penelitian Fakhriza (2017) memahami hal serupa pada perubahan kebijakan ritual yang melalui proses *interface*. Sedangkan, penelitian McDonald, & Macken-Walsh (2016) hanya berfokus pada satu aktor dan memahami interaksi dan responnya pada sebuah perubahan yang terjadi. Penelitian Turnbull, Hernández & Reyes (2009) serupa, namun dalam konteks pemberdayaan. Penelitian ini menganalisis pengelolaan pasar melalui interaksi antar aktor sebagai kebijakan yang telah ada atau hasil dari *interface* yang sudah selesai ataupun masih diperdebatkan.

Penelitian sebelumnya terkait konteks pasar mingguan oleh Ali Gufron (2014) menyoroti pengelolaan pasar dalam pelaksanaan pasar mingguan dan tradisional, pada Listihana & Arizal (2020) berkaitan dengan keresahan masyarakat, dan dalam Styawan dan Rahman (2021) berkaitan dengan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pasar. Selain itu, penelitian Muhsin, Shaleh, & Amin (2022) dan Shabraniti & Djabar (2024) menganalisis masalah dan solusi yang dapat muncul dari benturan kepentingan para aktor dalam pasar mingguan. Penelitian yang membahas pengelolaan pasar secara holistik dan menganalisis setiap aktor yang terlibat menggunakan pendekatan orientasi aktor belum dilakukan. Maka dari itu, penelitian ini mengeksplorasi pengelolaan pasar sabtu melalui pendekatan aktor dan bagaimana interaksi antar aktor berpengaruh terhadap keberlanjutan pasar. Sehingga, pengelolaan yang terjadi dalam pengadaan pasar sabtu dapat menjadi referensi dalam menanggulangi permasalahan lain terkait pengelolaan pasar tradisional di kota-kota besar atau pedesaan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi untuk memahami fenomena pasar mingguan secara mendalam melalui interaksi aktor-aktor yang terlibat. Dalam memperdalam analisisnya, digunakan pendekatan orientasi aktor dari Norman Long yang membawa konsep *interface*. Pendekatan tersebut mengidentifikasi sejumlah aktor yang memiliki kepentingan, pengetahuan, strategi dan nilai-nilai, serta menganalisis interaksi sosial, proses negosiasi, dinamika kekuasaan antar aktor dalam suatu "arena" yang menghasilkan suatu perubahan sosial dalam sebuah struktur (Gerharz, 2018). Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Sabtu, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang merupakan pasar mingguan yang dikelola oleh masyarakat setempat. Lokasi ini dipilih karena keberadaan pasar yang sudah berlangsung secara rutin dan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* pada informan yang memiliki pengetahuan atau peran signifikan dalam pengelolaan pasar. Informan utama terdiri dari 7 petugas pasar, 4 pedagang yang beragam jenis dagangannya, 3 pemilik warung, beberapa warga, ketua RW dan perwakilan Satpol PP. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, di antaranya:

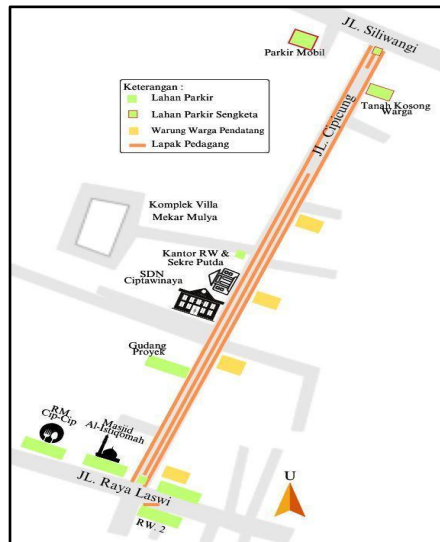
1. Wawancara mendalam: dilakukan dengan pedagang, petugas pasar, pemilik warung, warga, ketua RW dan Satpol PP untuk menggali pemahaman mengenai pengelolaan pasar dan kepentingan mereka;
2. Observasi non-partisipan: melakukan observasi terhadap dinamika pasar setiap sabtu untuk memahami interaksi antar aktor dan mekanisme pengelolaan pasar yang terjadi;
3. Pengumpulan data sekunder: menggunakan dokumen terkait peraturan pasar, kebijakan lokal, dan catatan administratif dari petugas pasar.

Metode analisis data menggunakan pendekatan etnografi yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu pembacaan, analisis, transformasi, interpretasi, dan penulisan (Spradley, 1980). Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan orientasi aktor melalui identifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pengelolaan pasar.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pasar Sabtu

Pasar Sabtu termasuk pasar tonggeng karena pengunjung yang berbelanja dengan posisi tubuh *nonggeng* atau badan membungkuk dengan kepala ke bawah dan pantat berada lebih atas daripada kepala. Kerap kali disebut juga Pasar Cipicung karena lokasi pasar ini berada di sepanjang Jalan Cipicung, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung yang termasuk dalam wilayah RW 1. Jalan ini memanjang secara vertikal diantara Jalan Siliwangi dan Jalan Raya Laswi. Jalan Cipicung memiliki lebar ± 7 m dan panjang jalan ± 350 m. Sepanjang sisi jalan ini tidak hanya dipenuhi oleh rumah warga, namun terdapat bangunan lain seperti warung, tempat pemancingan umum, perumahan villa, pintu samping pabrik, GSG (Gedung Serba Guna) Cipicung, kantor partai, praktik bidan, praktik dokter gigi, bengkel angkot, kantor RW 1 & Sekre Putda, SDN Ciptawinaya, dan madrasah. Jumlah pedagang di Jalan Cipicung ialah 261 orang dan pedagang yang berada di lahan RW 2 ialah 3 pedagang makanan serta 1-3 pedagang tak menentu.



Gambar 1. Peta Pasar Sabtu
Sumber: Penulis, 2025

Cikal bakal pasar ini diinisiasi 2-3 pedagang yang setiap hari berdagang di depan SDN Ciptawinaya tahun 2012. Lokasi tersebut selalu ramai oleh pelajar dan orang tua yang mengantarkan atau menunggu anaknya selesai sekolah. Seiring berjalannya waktu, pedagang bertambah hingga mencapai 7 pedagang. Melihat keadaan tersebut, pemuda RW 1 mengkomunikasikan inisiasi pembuatan pasar bersama pedagang kepada RT dan RW. Mereka mengizinkan adanya pengadaan pasar dengan berjalannya retribusi. Petugas bersama pedagang membuat surat edaran berisi ajakan untuk berdagang di pasar sabtu. Surat tersebut disebarkan oleh pedagang awal kepada pedagang lain secara *tatalepa* atau dari mulut ke mulut. Pedagang awal tersebut kini disebut pedagang perintis. Diantara pedagang perintis, ada pedagang yang disebut sesepuh pedagang keliling karena pernah menjadi ketua komunitas pedagang pasar keliling. Dia lah yang selalu menjadi perwakilan pedagang dalam kegiatan tertentu. Dalam sebulan, lapak kanan dan kiri jalan terisi penuh. Pengadaan lapak pedagang mengundang keramaian dan pemakaian fasilitas umum. Petugas pasar mulai mengurus perizinan dengan membuat surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh ketua RT dan RW, kemudian kelurahan bersamaan Babinsa, yang selanjutnya diserahkan ke pihak kecamatan bersamaan dengan Satpol PP.

Satpol PP mengusulkan konsep *car free day*, sehingga jalur tengah pedagang dapat dibuka. Aturan dari Satpol PP ialah lapak pedagang harus tertata, lapak berada satu meter dari ujung jalan, tidak melebihi bahu jalan, tidak menimbulkan kemacetan, tidak meninggalkan sampah dan lapak selepas pasar. Disamping itu, bilamana ada program pemerintah, maka pelaku usaha siap untuk pindah tanpa meminta penggantinya karena lahan tersebut memang tidak digunakan untuk pasar. Berdasarkan Perda 5 Tahun 2015, pasar harus dapat memelihara beberapa ketertiban umum diantaranya tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai; tertib sungai, saluran, dan kolam; tertib lingkungan; tertib usaha tertentu; tertib bangunan gedung; dan tertib sosial.

Satpol PP sering datang ke sekre pemuda untuk melakukan koordinasi, pemantauan dan memberikan masukan pelaksanaan pasar sabtu. Mereka tidak melakukan intervensi secara langsung, dalam artian apabila ada sesuatu yang melanggar di lapangan tidak akan ditindak langsung oleh Satpol PP, namun mereka akan memberitahu pelanggaran kepada petugas pasar

untuk diperbaiki. Disamping itu, Satpol PP selalu melakukan peninjauan rutin yang dilakukan oleh tim siaga dalam melakukan pengawasan lapangan dan melaporkannya kepada atasan.

Pada tahun 2017, pasar ini mengalami pergantian waktu pelaksanaan dari hari rabu menjadi hari sabtu. Hal ini disebabkan munculnya kemacetan di Jalan Cipicung yang menyebar hingga ke Jalan Raya Laswi dan Jalan Siliwangi. Sehingga, Satpol PP mengarahkan untuk dipindahkan ke akhir pekan agar tidak muncul kemacetan di pagi hari akibat aktivitas sekolah ataupun bekerja. Kemudian, pada tahun 2020-2021, pasar sabtu dilarang diadakan oleh pemerintah karena sedang masa pandemi Covid-19. Pasar sejenis ini tidak ada jaminan bagi pedagang untuk dapat terus berdagang karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan atas kepentingan umum seperti arahan penutupan dari pemerintah ataupun keinginan warga seperti penolakan dari minimal 10 kepala keluarga. Disamping itu, pasar dapat dibubarkan atau diundur sementara apabila ada agenda kegiatan warga seperti pernikahan. Ketika ada pengunduran pelaksanaan pasar sabtu, akan diumumkan sejak pengadaan pasar sabtu sebelumnya.

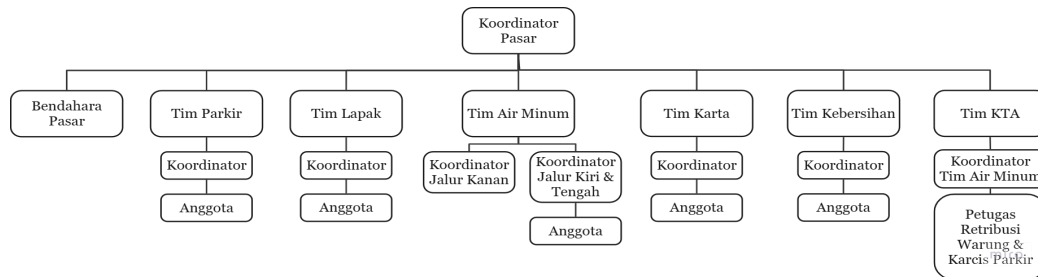
3.2 Petugas Pasar

Pemuda RW 1 yang menginisiasi pembentukan pasar adalah inti Putra Daerah. Putra daerah atau akrab dipanggil Putda diisi oleh pemuda laki-laki yang telah berumur dewasa menuju tua. Inti pengurus Putda beranggotakan 5 orang yang bertugas mengkoordinasikan seluruh persoalan dan aktivitas Putda. Apabila semua hal didiskusikan bersama 30 orang anggota Putda lainnya akan muncul banyak pendapat dan sulit mencapai keputusan. Pengurus inti juga dipercaya untuk mencari orang kepercayaannya atau membawahi anggota sebanyak 2-3 orang. Setiap inti Putda dibagi berdasarkan kegiatan Putda diantaranya satu orang mengurus proyek pembangunan dan 4 orang lainnya mengurus pasar serta beberapa kegiatan sosial tentatif seperti lomba burung. Pembagian tugas inti Putda juga dapat fleksibel, petugas yang biasanya menangani proyek dapat sementara ditarik dahulu untuk mengurus pasar dan sebaliknya. Di daerah Cipicung, apabila ada proyek pembangunan selalu ramai oleh ormas, namun khusus proyek di RW 1 tidak bisa dimasuki ormas karena hadirnya Putda. Putda memiliki simbol 'otomatis', sehingga mereka bergerak dengan penuh inisiatif atau tidak perlu disuruh terlebih dahulu. Pertemuan atau rapat Putda hanya diadakan apabila ada keperluan diskusi dan belum ada kegiatan rutin Putda.

Tidak hanya inti dan anggota Putda saja yang menjadi petugas pasar, namun anggota karang taruna dan warga juga terlibat. Petugas pasar sering disebut 'anak-anak' oleh inti putda dan pedagang karena biasanya berumur lebih muda dari mereka. Dahulu, warga gengsi untuk menjadi petugas dan pemuda karang taruna pun menolak karena alasan dimarahi oleh orang tua. Ketika pasar sabtu mulai ramai, mereka mulai menginginkan posisi petugas pasar. Sebagian anak Cipicung yang terkenal sering melakukan kenakalan diajak bergabung menjadi petugas dan membuat mereka memiliki rasa tanggung jawab. Warga yang diajak menjadi petugas pasar ialah mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Disisi lain, hal ini menjadi sebuah persoalan apabila ada warga yang tidak bekerja dan ingin menjadi petugas pasar ketika pasar sabtu sudah tidak diperlukan SDM lagi. Petugas kesulitan untuk mengalokasikan petugas baru, namun hal tersebut tidak bisa ditolak karena ikatan sesama warga. Sehingga, petugas mencari celah tim mana yang dapat ditambahkan SDM. Bila tidak ada peluang, maka uang pemasukan RW akan dikurangi sebagai gaji petugas tersebut.

Petugas pasar sabtu terbagi dalam beberapa tim yang terbentuk berdasarkan retribusi yang ditarik. Setiap tim retribusi, kecuali tim KTA (Kartu Tanda Anggota) melakukan pembagian tugas anggotanya berdasarkan jalur lapak pedagang. Ketika petugas sejak awal ditempatkan di jalur tersebut, akan terus menerus menarik retribusi di jalur tersebut. Ini berkontribusi dalam

mencegah premanisme karena pedagang mengetahui petugas yang biasa menarik retribusi. Petugas yang menarik retribusi mengatur urutan giliran menagih kepada pedagang secara spontan tanpa ada aturan khusus. Dalam menarik retribusi, petugas biasanya tidak menyiapkan uang receh, ia hanya bermodalkan kertas karcis. Petugas yang bergerak dalam menarik retribusi karang taruna diisi oleh 1 orang koordinator dan 3 orang anggota. Sedangkan, petugas yang menarik retribusi lapak terdiri dari 1 orang koordinator dan 5 anggota. Selanjutnya, terdapat petugas tim kebersihan dengan 1 koordinator dan 3 orang anggota. Petugas parkir memiliki tim nya sendiri sesuai dengan lokasi lahan parkir. Setiap lahan parkir terdapat 2-3 petugas yang diisi oleh pemuda dari berbagai RT di RW 1. Khusus petugas air minum, terdapat 2 orang koordinator, yang memegang lapak jalur kanan tidak memiliki anggota, dan seorang koordinator jalur tengah & kiri beserta 2 anggota.



Gambar 2. Struktur Kepengurusan Pasar
Sumber: Penulis, 2025

Kemudian, ada satu petugas yang berurusan dengan pengelolaan hasil keuangan atau bendahara uang pasar. Bendahara pasar baru saja mengalami pergantian sejak Agustus 2023 karena bendahara dahulu ada kepentingan pribadi yang mendesak. Ada juga 2 orang petugas yang mengurus KTA pedagang. Petugas yang mengurus KTA dipilih dari pihak yang netral dan dipercayai untuk memegang uang. Apabila dialokasikan kepada petugas lapangan tim lapak ataupun karang taruna ditakutkan akan ada permainan keuangan yang tidak diinginkan. Contoh permainan tersebut ialah dalam jual-beli lapak yang seharusnya dilakukan oleh bendahara pasar, namun tim karang taruna yang mengambil alih. Meski sudah diketahui bendahara pasar, hal ini dibiarkan karena petugas yang melakukannya salah satu inti Putda. Selain itu, ada pengurus seksi pasar, pemuda, dan olahraga RW 1 yang bertugas melaporkan uang masuk dan uang keluar, keadaan pasar, khususnya apabila ada kejadian yang menimbulkan masalah secara lisan atau *chat whatsapp* kepada ketua RW.

Pasar sabtu secara perizinan dan kewilayahan berada di RW 1, namun keadaan banyaknya pedagang yang ingin berjualan dan keadaan kurangnya lahan parkir, khususnya bagi mobil menyebabkan adanya perluasan wilayah pasar sabtu ke daerah RW 2 yang petugasnya berasal dari RW 2. Ada seorang petugas yang mengurus parkir RW 2 dan satu petugas dari RW yang menarik retribusi kepada pedagang.

Setiap petugas baik koordinator atau anggota bertugas menarik retribusi. Bedanya, koordinator dibebankan dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang muncul di tim nya dan apabila belum dapat diselesaikan, dapat dikoordinasikan bersama dengan inti Putda. Meskipun ada pengurus seksi pasar, pemuda, dan olahraga RW yang memantau dan mengawasi pasar sabtu serta mengurus masalah yang timbul dari pasar. Petugas pasar selalu mengusahakan permasalahan selesai dengan inti Putda kecuali permasalahan yang membutuhkan partisipasi pihak RW.

3.3 Pengelolaan Pasar

3.3.1 Pedagang

Pedagang di pasar sabtu kebanyakan berdagang juga di pasar mingguan lainnya atau disebut dengan pedagang pasar keliling. Mereka mendapatkan barang dari konveksi atau grosir untuk mendapatkan harga yang murah, sedangkan pedagang makanan membeli bahan di pasar dan memproduksi sendiri. Pedagang makanan biasanya membeli barang secara tunai, sedangkan pedagang pakaian ada yang memakai 'sistem nganjuk', yaitu mengambil barang dagangan di muka dan dibayar secara dicicil. Modal yang mereka keluarkan dapat beragam sesuai dengan harga barang dagangan yang mereka jual. Keuntungan yang didapat tidak menentu, meskipun pasar sedang ramai, belum tentu barang dagangan banyak terjual.

Alat berdagang mereka beragam, diantaranya *stand booth*, meja kayu, meja plastik, terpal, gantungan baju beserta manekinnya, kendaraan motor, mobil, sepeda atau gerobak. Pada awal pelaksanaan pasar, ada jasa pembuatan meja kayu/bambu oleh koordinator tim kebersihan yang kebetulan memiliki keterampilan tersebut. Biaya meja dan jasa pembuatannya beragam sesuai ukuran meja dan dapat dibayar secara kredit. Apabila biaya bahan Rp100.000,-, biaya jasanya Rp100.000,- pula. Kemudian, petugas yang sama juga membuka jasa penitipan alat dagang. Biaya jasa penitipan untuk meja kecil Rp5.000,-, meja sedang Rp10.000,- dan meja besar Rp15.000,-. Disamping itu, ada 3 pedagang yang menitipkan alat dagang besi yang ditarif Rp20.000,-. Sampai saat ini, ada 40 alat dagang yang memakai jasa penitipan dan tidak membuka penitipan alat dagang lagi karena tidak ada tempat untuk menyimpannya. Tempat penyimpanan alat dagang berada di pinggir jalan yang beratap, tanah kosong yang beratap, dan di kantor RW.

Barang yang dijual di pasar sabtu begitu beragam, baik makanan, minuman, parabot, kosmetik, pakaian baru dan *thrift* anak atau dewasa, mainan, dan sebagainya. Dalam menawarkan dagangannya kerap kali mereka berteriak dengan menyebutkan jenis barang dagangan dan harganya atau disaat pengunjung lewat mereka berusaha menawarkan dagangannya. Tentunya dalam proses kegiatan jual-beli selalu ada kegiatan tawar menawar harga.

Terdapat beberapa kelompok pedagang keliling diantaranya Kompak, Turaes, Balad, Papatong, dan Angin-Angin. Namun, hanya Kompak yang melakukan legalitas organisasi ke Kesbangpol sejak 2017 dan mendapatkan pendanaan serta melakukan pelaporan kegiatan. Kelompok pedagang keliling menunjukkan identitas dirinya dengan logo, pakaian, dan KTA komunitas. Kelompok pedagang tersebut terdapat kegiatan bersama (pengajian, halal bihalal, *touring*), rapat dan penghimpunan uang kas. Uang kas dialokasikan untuk kegiatan mereka dan sumbangan bila ada pedagang kecelakaan berat, istrinya melahirkan, ataupun keluarga batih pedagang yang meninggal. Ada saja pedagang yang menyumbang diluar uang kas apabila hubungannya sudah akrab dibandingkan dengan pedagang lain. Selain itu, ada kegiatan sosial seperti membagikan sembako ke anak yatim piatu, jumat berkah, bantuan korban bencana alam. Kelompok tersebut memiliki grup whatsapp sebagai media penyalur informasi terkait pasar yang tutup sementara, kabar duka kematian, atau sumbangan. Disamping itu, terdapat juga grup whatsapp yang dibentuk oleh petugas pasar untuk absensi berdagang, pengumuman dan penyaluran kabar lainnya.

Dinamika hubungan antar pedagang tergantung kedekatan dan kecocokan antar pedagang. Mereka ada yang iri terkait laku-tidaknya barang dagangan dan ada juga yang berteman. Kebersamaan spontan mereka di pasar muncul ketika ada pedagang membawa makanan dan mengajak pedagang lain untuk ikut makan, '*wih kadieu, ngariung, ngariung*' (wih, kesini, berkumpul, berkumpul).

Pasar ini dapat bubar oleh panas atau hujan, semakin panas dan hujan deras, semakin membuat pedagang dan pengunjung bubar. Namun, bila hujan muncul saat pasar hendak dimulai, ada saja pedagang yang tidak jadi berjualan meski sudah sampai di lapaknya karena tidak membawa tenda atau pedagang tersebut menunggu hujan reda. Maka dari itu, biasanya bila hujan pada pelaksanaan pasar sabtu, tidak semua pedagang berdagang.

Pedagang harus memiliki KTA pedagang pasar sabtu yang didata dan diproduksi setiap satu tahun sekali. Namun, KTA ini tidak berlaku bagi pedagang di RW 2 karena perbedaan pengelolaan. Pedagang baru yang masih menempati lapak pedagang lain secara berpindah-pindah tidak perlu membuat KTA. Apabila ada satu pedagang yang mengambil 2 lapak, dia tetap membuat satu KTA. Pendataan KTA dilakukan pada bulan Oktober, November dan Desember sekaligus penghimpunan dana dari pedagang dengan sistem cicilan. Pendataan pedagang selalu dilakukan karena adanya perubahan pedagang baik yang sudah tidak berdagang, penjualan lapak ataupun pedagang baru setiap tahunnya. Hal itu terjadi karena ada saja pedagang tidak langsung melapor ke petugas dan petugas tidak langsung mencatatnya. Hal tersebut menjadi persoalan pada produksi KTA tahun lalu karena terdapat 40 kartu yang tidak keluar dari pendataan 290 pedagang.

Secara fisik, kartu KTA berbahan plastik dengan bagian depan berisikan biodata pedagang diantaranya nomor, nama, alamat singkat, jenis dagang, dan masa berlaku. Kemudian di bagian belakang terdapat ketentuan bagi pedagang disertai tanda tangan ketua RW. Ketentuan pedagang tersebut diantaranya:

1. Kartu ini berlaku untuk satu orang;
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berjualan;
3. Tidak bisa dipindah tangankan;
4. Apabila 4 x berturut-turut tidak berjualan, maka dianggap mengundurkan diri;
5. Tidak akan terjadi tuntutan jika ada penertiban dari pihak berwenang;
6. Sebagai anggota wajib taat pada aturan;
7. Jika kartu anggota hilang, secepatnya lapor pada petugas;
8. Lapak tidak bisa diperjualbelikan.

Keuntungan pedagang yang sudah memiliki kartu itu diprioritaskan dari lapak. Pedagang jalur tengah yang sudah memiliki KTA akan ditempatkan ke jalur kanan atau kiri apabila ada lapak kosong, sedangkan bagi pedagang baru yang belum memiliki KTA akan ditempatkan di lapak jalur tengah. Pedagang di jalur tengah sebetulnya tidak perlu membayar KTA karena sifat lapak jalur tengah yang pertama dibubarkan apabila ada kepentingan umum. Sehingga kartu mereka disebut kartu bayangan dari kartu utama. Namun, muncul kecemburuan sosial dari pedagang jalur kanan dan kiri kepada pedagang jalur tengah. Persoalannya, sudah lama jalur tengah tidak pernah dibubarkan, karena apabila ada kepentingan umum diusahakan untuk perpindahan hari pelaksanaan pasar sabtu dibandingkan dengan pembubaran jalur tengah. Disamping itu, kegiatan warga pun bersifat tentatif dan mereka secara inisiatif menghindari pengadaan kegiatan di hari sabtu karena kesulitan akses mobilisasi. Hal itu menyebabkan pedagang jalur tengah tetap berdagang seperti pedagang di jalur kanan dan kiri. Nominal pembayaran KTA pun disamakan dengan pedagang di jalur lain. Disisi lain, hal ini menimbulkan ketakutan apabila sewaktu-waktu jalur tengah bubar dalam posisi sudah memiliki KTA, mereka akan merasa menjadi anggota prioritas. Padahal tidak ada jaminan peralihan lapak apabila jalur tengah tiba-tiba dibubarkan.

KTA selesai diproduksi di bulan Desember dan hanya akan dibagikan saat seluruh pedagang telah membayar uang KTA. Sehingga, apabila ada pedagang yang bertanya tentang KTA yang belum dibagikan, petugas mengarahkan untuk menagih ke pedagang yang belum lunas

untuk membayar. Hal tersebut dilakukan agar pedagang yang belum lunas merasa malu dan segera membayar. Hal ini menjadi strategi dalam menghadapi tantangan dalam menagih uang KTA.

3.3.2 Lapak

Dahulu pedagang pasar sabtu hanya berada dipinggir kanan dan kiri jalan dari ujung Jalan Raya Laswi sampai SDN Ciptawinaya. Setelah ramai, mulai merebak hingga ke ujung Jalan Siliwangi dan memunculkan jalur tengah. Pada awal berdirinya pasar, masih banyak lapak yang kosong, sehingga pedagang menempati lahan yang kosong berdasarkan informasi pedagang lain tanpa ada aturan lebar lapak. Sehingga, pedagang perintis biasanya memiliki lapak yang lebih lebar dibandingkan pedagang lain. Sekarang, keadaan lapak sudah penuh dan sulit untuk mendapatkan lapak kosong. Pedagang baru diarahkan untuk menempati lapak kosong milik pedagang lain yang tidak berjualan untuk sementara. Pedagang baru juga sering ditempatkan di jalur tengah mengingat sifat jalur tengah yang pertama dibubarkan apabila ada kepentingan umum. Apabila terjadi pembubaran, antisipasinya pedagang jalur tengah sementara dialokasikan ke pinggir jalan raya. Jumlah lapak di pasar sabtu tidak dapat bertambah karena sudah memenuhi jalan Cipicung dari ujung ke ujung dan sulit melakukan pelebaran karena bertemu jalan raya yang punggung jalannya tidak lebar. Apabila lapak di Jalan Cipicung sudah penuh, pedagang akan diarahkan untuk mengambil lapak di wilayah RW 2. Saat awal pasar sabtu didirikan, wilayah lapak di RW 2 ramai, namun sejalannya waktu, satu persatu pedagang mulai tidak berjualan. Hal ini disebabkan kurangnya pembeli karena pedagang banyak berkumpul di Jalan Cipicung. Ketika pembeli sedikit, dagangan pedagang kurang laku namun mereka harus tetap membayar retribusi yang menimbulkan kerugian.

Penempatan lapak pedagang diatur oleh petugas, bila ada yang protes terkait penempatan lapak pedagang dan sudah diberikan arahan, namun pedagang masih komplain, pedagang tersebut dipersilahkan untuk tidak berdagang disini. Tata letak lapak pedagang dengan jenis barang yang sama dibuat selang-seling. Luas lapak pedagang mulai dari 1-3 meter. Khusus pedagang yang berjualan dengan mobil dan disampingnya membuka tenda akan dianggap 2 lapak karena menyentuh 4 meter, sedangkan pedagang yang hanya berjualan di dalam mobil akan dianggap 1 lapak. Apabila pedagang tidak berdagang selama 4 minggu, ditunggu dahulu kabarnya selama 2 minggu, apabila masih tidak ada kabar lapak otomatis hilang. Dalam hal ini, muncul jual-beli lapak oleh petugas. Uang yang digunakan dalam transaksi jual-beli lapak disebut uang '*kadeudeuh*' atau uang kasih sayang yang masuk ke kantung pribadi petugas.

Sebetulnya, fungsi Kartu Anggota (KTA) untuk menandai kepemilikan lapak, namun hal ini tidak berlaku karena antar sesama pedagang sudah tahu lokasi lapak masing-masing. Jaminan yang berlaku antar pedagang yaitu lapak pedagang A tidak dapat digeser dengan pedagang B. Ketika ada pergeseran, timbul konflik antar pedagang yang biasanya diselesaikan oleh petugas dengan pemberian batas tanda menggunakan kapur atau pilox.

3.3.3 Retribusi

Ketika pasar diizinkan oleh RT dan RW, muncul retribusi lapak yang ditarik oleh ketua RT dan parkir oleh pemuda RW 1. Kemudian, pemuda RW 1 menyadari bahwa karang taruna tidak memiliki pendapatan dari pasar, maka diadakan retribusi karang taruna. Saat mensosialisasikan retribusi ini kepada pedagang lumayan sulit dan perlu diberikan pengertian secara terus-menerus agar pedagang mau membayarnya. Setelah itu, muncul retribusi kebersihan karena timbul masalah kebersihan selepas pengadaan pasar. Petugas mengarahkan seorang warga yang memang memiliki profesi yang dekat dengan pengelolaan barang tidak terpakai. Kemudian,

muncul distribusi air minum pedagang dan KTA. Retribusi tersebut memiliki nominal diantaranya retribusi lapak Rp7.000,-; karang taruna Rp4.000,-; kebersihan pedagang sayuran & ayam Rp 5.000,- dan kebersihan pedagang lainnya Rp 4.000,-; parkir motor Rp 3.000,- dan parkir mobil Rp 5.000,-; air minum Rp 3.000,-, apabila membeli 2 buah menjadi Rp 5.000,-; dan KTA yang dibayar setahun sekali Rp50.000,-. Sedangkan, pedagang di lahan RW 2 terdapat kesamaan retribusi kebersihan dan parkir, ada perbedaan pada retribusi lapak sejumlah Rp5.000,- dan kas RW sejumlah Rp5.000,-.

Retribusi warung berlaku sejak awal tahun 2024 dengan tarif Rp10.000,- yang hanya berlaku setiap pengadaan pasar sabtu. Retribusi tersebut berlaku bagi 4 warung yang dimiliki oleh warga pendatang. Petugas beranggapan bahwa warung tersebut sama seperti pedagang yang merupakan orang luar dan memanfaatkan situasi pasar hingga warungnya terbawa ramai. Memang betul adanya penambahan konsumen dari pedagang yang berbelanja ke warung, namun tidak dari pengunjung pasar karena tujuan mereka berbelanja kepada pedagang di pasar sabtu. Seharusnya tidak ada retribusi untuk warung karena halaman depan warung sudah dipakai untuk pelaksanaan pasar sabtu. Pemilik warung pun sedikit kebingungan untuk mengadakan keluhannya karena petugas memiliki alasan penarikan retribusi dan ketua RT/RW sudah mengizinkan aturan retribusi.

Nominal retribusi dapat berubah dalam beberapa situasi diantaranya retribusi lapak dapat berkurang menjadi Rp4.000,- atau Rp5.000,- pada pedagang yang hanya menjual satu jenis barang. Luas lapak menjadi pertimbangan nominal retribusi, apabila lapak mencapai lebar 3,5 m akan dikenakan retribusi dua kali lipat dari nominal normal karena dianggap menempati 2 lapak. Ada saja pedagang yang sengaja memberi uang lebih saat dagangannya banyak terjual ataupun tidak membayar retribusi karena belum ada barang yang terjual dan tidak membawa uang. Kemudian, retribusi kebersihan mengalami kenaikan menjadi Rp7000,- kepada seluruh pedagang pada minggu terakhir bulan ramadhan yang sebagian dialokasikan untuk THR petugas kebersihan. Kertas retribusinya pun berbeda, petugas mencetak khusus kertas retribusi dengan ucapan 'Selamat Hari Raya Idul Fitri' disertai tulisan arab "تقبل الله منا ومنكم" (Tabarakallah Minna wa Minkum) yang artinya "Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian". Sedangkan, petugas lain mengadakan satu tiket retribusi tambahan untuk THR dengan nominal Rp7.000,-. Kenaikan nominal retribusi pasar pun pernah dilakukan karena kenaikan biaya operasional dan penyesuaian harga jasa dan barang pada umumnya. Contohnya, retribusi kebersihan mengalami kenaikan karena adanya kenaikan biaya penarikan sampah atau retribusi air minum dahulu hanya seharga Rp1.000,- dan kini harganya mencapai Rp3.000,- karena harga beli yang meningkat. Apabila ada kenaikan harga retribusi, petugas mengumumkan rencana kenaikan retribusi beserta alasannya dan melakukan konsultasi dengan pedagang perintis.

3.3.4 Hasil Keuangan

Hasil penarikan retribusi memiliki pengelolaan dan alokasinya masing-masing. Setiap pengadaan pasar akan menghasilkan jumlah uang yang berbeda-beda tergantung jumlah pedagang yang datang berjualan. Dalam penghimpunan dana hasil pasar, tidak seluruh tim retribusi datang ke sekre Putda untuk melakukan setoran retribusi, hanya tim lapak, tim karta dan petugas retribusi warung & karcis parkir. Setoran hasil retribusi dilakukan kepada bendahara pasar di sekre Putda. Pendapatan pasar yang dialokasikan kepada RW digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat diantaranya, membeli tanah wakaf yang sudah seluas 2 kali 12 tumbak atau 336 m²; membantu biaya pembelian mobil ambulance; kegiatan sosial seperti sembako warga dan kegiatan buka bersama anak yatim; dan pembangunan wilayah RW 1 diantaranya perbaikan jalan dan gang, perbaikan dan pembersihan saluran air, membantu

biaya bedah rumah, penyelesaian pembangunan kantor RW, dan bedah masjid. Selain itu, tidak ada hasil pasar yang diterima secara langsung oleh warga. Apabila dalam satu bulan ada 5 minggu, minggu ke 5 berlaku 'sabtu bonus', tidak adanya setoran ke kas RW. Uang tersebut dialokasikan untuk tambahan pendapatan petugas dan RT serta tokoh masyarakat.

Retribusi lapak biasanya menghasilkan nominal $\pm$ Rp1.700.000,-, 25% dari jumlah tersebut atau Rp400.000,- sebagai upah untuk 5 petugas retribusi lapak. Sisanya Rp1.300.000,- dikurangi pengeluaran. Pengeluaran ini diantaranya alokasi kas RW sebanyak Rp500.000,-, Rp200.000,- untuk membayar pengangkutan sampah, dan pengeluaran biaya operasional per hari sabtu seperti rokok dan kopi untuk petugas, tokoh masyarakat dan Satpol PP yang dibeli dari warung sekitar. Ada pula tokoh masyarakat yang diberi jatah uang tiap minggu dan diberikan sebulan sekali ataupun hanya sebulan sekali dengan nominal tertentu. Sebutan 'sabtu ceria' berlaku pada tokoh masyarakat yang datang ke pasar sabtu karena apabila tidak datang, tokoh masyarakat tidak akan mendapatkan jatah. Disamping itu, terdapat pengeluaran pasar lain yang tidak menentu atau pengeluaran *dadakan* seperti adanya kunjungan calon bupati yang memunculkan pengeluaran rokok untuk Koramil, kegiatan posyandu, dan kegiatan tidak rutin lainnya.

Jika pemasukan retribusi lapak setelah dialokasikan kepada petugas, kas RW, tokoh masyarakat, dan biaya operasional hasilnya minus, hanya terdapat dua jalan keluar. Apabila jumlah minusnya kecil, minus tersebut merupakan tanggung jawab bendahara pasar yang harus membayarnya karena dia yang mengelola keuangan. Apabila bernominal besar akan dikurangi dari alokasi ke kas RW. Nominal minus dapat terjadi akibat adanya pengeluaran *dadakan* yang muncul pada siang hari ketika keuangan sudah dialokasikan. Sebaliknya, apabila pemasukan retribusi lapak sudah dikurangi oleh pengeluaran dan tersisa dana, dialokasikan sebagai upah bendahara pasar.

Hasil retribusi karang taruna disetorkan kepada bendahara pasar sesuai jalur lapak pedagang. Petugas di jalur kanan, kiri, dan tengah masing-masing setor Rp50.000,- dengan alokasi untuk kas karang taruna, kas putra daerah, dan tabungan. Sisa uangnya dialokasikan untuk upah tim karta. Alokasi uang kas karta ditahan dahulu di putda, apabila akan ada kegiatan dan memerlukan dana, karta harus melapor terlebih dahulu ke putda. Keputusan tersebut sudah dikoordinasikan sebelumnya melalui diskusi dan kertas perjanjian. Hal ini dilakukan karena pernah terjadi pada salah satu pelaksanaan kegiatan karta yang terlihat tidak sesuai dengan jumlah dana yang didapatkan. Dana tabungan dalam sebulan akan terhimpun Rp200.000,-, dimana Rp100.000,- dialokasikan untuk pembuatan karcis dan sisanya untuk dana darurat. Kemudian, kas Putda dialokasikan untuk pribadi RW Rp100.000,-, sisanya dibagikan untuk petugas.

Pengelolaan kebersihan memiliki tim nya sendiri untuk menarik dan mengelola hasil keuangannya. Hasil yang didapat dari retribusi kebersihan kurang lebih sejumlah Rp1.200.000,- yang dialokasikan Rp100.000,- untuk menambah biaya pengangkutan sampah, terkadang membeli peralatan sampah dan sisanya upah petugas kebersihan. Upah petugas kebersihan sekitar Rp300.000,- yang dipotong Rp20.000,- untuk THR. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi satu petugas yang hanya memegang karung saat kegiatan kebersihan, ia memiliki upah Rp50.000,- dan tidak ada potongan apapun. Tim kebersihan pernah membantu membayar biaya penarikan sampah warga yang kurang, meski tidak selalu dilakukan. Hal itu biasanya terjadi saat musim hujan karena tidak seperti pada musim kemarau yang sebagian sampahnya dapat dikurangi dengan dibakar.

Hasil retribusi air minum tidak dilakukan setoran karena hanya berupa usaha anak-anak. Air minum botol yang diberikan kepada pedagang berasal dari 3 warung warga yang berbeda. Tiga jalur pedagang dapat menghabiskan sekitar 15-18 dus air minum karena ada sedikit

pedagang yang tidak membeli air minum. Apabila pemberian air minum tidak dilakukan sejak pagi akan lebih banyak pedagang yang menolak air minum karena sudah terlanjur membeli air. Harga air botol minum per dus sekitar Rp26.500,- hingga Rp30.000,- sesuai dengan merek air minum. Uang hasil penjualan dikurangi uang pembelian air minum dari warung dan sisanya menjadi upah petugas. Upahnya tidak selalu tetap namun kadang mencapai nominal Rp90.000,-. Petugas air minum tidak memiliki modal usaha, mereka mengambil air minum kepada warung, memberikannya kepada pedagang, mendapatkan uang dan membayar kepada warung atau memakai 'sistem nganjuk'.

Petugas parkir dari tiap lahan melakukan setoran Rp5.000,- yang akan diambil oleh petugas retribusi warung & karcis parkir. Biaya tersebut dialokasikan untuk biaya produksi karcis yang dalam setahun mencapai Rp250.000,-. Setoran tersebut tidak berlaku bagi lahan parkir RW 2 karena dikelola oleh warga RW 2 dan tidak diberikan kertas karcis oleh petugas pasar. Petugas parkir pun tidak perlu melakukan setoran hasil ke bendahara pasar karena lahan yang mereka gunakan tidak dikenakan biaya apapun. Kecuali, pada lahan parkir milik salah satu inti putda dan lahan tanah kosong milik salah satu warga. Parkir milik salah satu inti Putda diawali oleh tugas dia sebagai petugas parkir saat berdirinya pasar, namun dia dipindahtugaskan pada penarikan retribusi karang taruna. Dia tidak mau kehilangan lahan parkir yang dia bangun sejak awal pasar, sehingga ia arahkan pemuda untuk bekerja di lahan parkirnya dan mendapatkan uang setoran. Sedangkan, parkir lahan tanah kosong warga ini sempat menjadi persoalan karena sebelum pergantian bendahara pasar tidak adanya setoran dan secara inisiatif petugas memotong rumput liar, namun setelah pergantian bendahara, pemilik lahan menginginkan adanya setoran sejumlah Rp30.000,-. Rencana petugas pasar, apabila tidak dapat dilobi untuk meniadakan setoran, lahan tersebut tidak akan digunakan. Apabila parkir lahan tanah kosong warga tersebut sepi dan hanya dapat menyetorkan uang sedikit, petugas parkir tersebut harus tetap dibayar minggu depan karena bendahara pasar tetap menyetorkan uang kepada pemilik lahan sesuai kesepakatan dari uang pribadi miliknya. Namun, apabila tidak ada motor yang parkir di lahan tersebut, petugas tidak akan menyetorkan uang kepada pemilik lahan kosong.

Uang biaya KTA dialokasikan untuk biaya produksi dan petugas serta tokoh masyarakat yang terlibat. Produksi kartu KTA dilakukan oleh mantan ketua RW yang mengurus pembentukan pasar. Harga biaya produksi satu kartu ditentukan oleh beliau yang merangkul biaya yang dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Biaya produksi kartu dibayar secara bertahap di awal, tengah, dan akhir bulan Desember. Satu kartu memiliki biaya produksi Rp20.000,-, sehingga menyisakan uang Rp30.000,-. Uang sisa tersebut dialokasikan untuk ATK, pengantian uang token listrik Kantor RW; petugas yang mengurus KTA; bonus pribadi RT & RW serta tokoh masyarakat lain; dan petugas pasar keseluruhan. Disamping itu, ada sebagian uang yang dialokasikan untuk kas RW namun hanya dari hasil KTA jalur kanan dan kiri saja. Sedangkan, uang KTA dari pedagang jalur tengah langsung dialokasikan kepada petugas pasar. Hal ini dikarenakan RW bertanggung jawab pada warga yang pengangguran untuk menjadi petugas pasar.

Hasil retribusi pemilik warung dialokasikan sejumlah 1 warung untuk petugas yang menarik retribusi dan 3 warung untuk pendapatan ketua koordinator pasar sebagai uang '*kadeudeuh*'. Kemudian, pendapatan dari penitipan alat dagang mencapai Rp400.000,- yang dikurangi 80 ribu untuk upah orang yang mengeluarkan dan memasukkan alat dagang. Upah tersebut masuk ke kantong koordinator tim kebersihan yang memang mengelola penitipan alat dagang. Disamping itu, hasil retribusi di RW 2 berupa retribusi lapak dialokasikan untuk petugas yang menagih retribusi dan retribusi kas RW 2 dialokasikan untuk kas RW.

Pada pengelolaan hasil pasar oleh bendahara sebelumnya ada kegiatan kasbon yaitu sarana peminjaman uang bagi petugas pasar. Namun, pada pengelolaan bendahara baru kasbon ditiadakan karena membuat pencatatan keuangan dahulu kurang baik dan memperumit pencatatan dan pengelolaan keuangan. Hal yang memusingkan dari kasbon, misalnya ada satu petugas yang mengambil kasbon Rp100.000,-, dia bayar Rp50.000,-, namun dia mengambil kasbon kembali Rp300.000,-. Kasbon tersebut masih ditagih hingga kini, namun ada saja orang yang sulit ditagih dengan alasan adanya persoalan kepemilikan dengan petugas bendahara dahulu.

3.3.5 Kebersihan

Petugas kebersihan membersihkan sampah di seluruh lahan yang digunakan dalam pasar baik lapak pedagang hingga lahan parkir. Mereka diarahkan pula untuk membersihkan sampah di gorong-gorong saluran air atas tekanan aspirasi warga dan gaji yang tinggi dibandingkan petugas di tim lain. Apabila tidak dilakukan, akan timbul komplain dari warga yang berpengaruh pada keberlanjutan pasar sabtu. Mereka harus membersihkan sampah sejak selesai pelaksanaan pasar hingga batas akhir sebelum jam 6 sore. Apabila hujan saat sedang membersihkan sampah, petugas kadang menunggu hujan selesai, namun bila hujan berlangsung lama, petugas membersihkan sampah sambil memakai jas hujan karena mengejar target waktu pembersihan.

3.3.6 Keamanan

Pasar yang ramai menjadi daya tarik pencopet, itulah yang terjadi di pasar sabtu. Ada saja pencopet yang mencuri barang berharga seperti handphone, dompet ataupun perhiasan milik pengunjung. Pelaku copet tidak memandang usia dan jenis kelamin, bahkan di pasar sabtu copet yang tertangkap kebanyakan berjenis kelamin perempuan dengan umur lansia yang menggunakan hijab. Copet yang tertangkap dibawa ke sekre putda, diserahkan barang curiannya, diberi pemahaman (laki-laki dipukuli & perempuan diceramahi), diarak sepanjang Jalan Cipicung agar semua pedagang tahu wajahnya, difoto wajahnya yang disebar di grup pedagang, dan diantarkan ke rumahnya takutnya merupakan sindikat copet. Apabila ada orang yang dicurigai sebagai copet, petugas membuntuti orang tersebut. Disamping itu, apabila pedagang, pengunjung atau warga yang menemukan dompet di pasar sabtu akan disimpan oleh petugas di Sekre Putda.

Ada pula kejadian kehilangan motor atas kelalaian pemilik motor yang memarkirkan kendaraannya di gang untuk jalan warga. Hal tersebut sudah merupakan kesalahan pemilik kendaraan, namun banyak pihak yang menganggap sebagai kelalaian petugas pasar. Dalam hal ini, petugas pasar tidak dapat bertindak banyak selain berusaha mencari kendaraan yang hilang karena karcis parkir digunakan untuk jasa menjaga kendaraan, bukan jaminan penggantian kendaraan. Maka dari itu, apabila ada pengunjung yang parkir di gang tersebut, petugas akan menarik karcis parkir yang lebih mahal dengan nominal Rp4.000,- agar orang yang parkir disana merasa kapok.

Maka dari itu, petugas ataupun pedagang kadang memberikan himbauan kepada pengunjung apabila melihat barang berharga pengunjung berada pada tempat yang tidak aman. Mereka memberi himbauan untuk menyimpan tas di depan badan karena motif copet menggunakan silet untuk merobek tas. Petugas pun kadang-kadang memberikan pengumuman pemberitahuan 'hati-hati ada copet' dari speaker Kantor RW. Apabila pengunjung merasa tidak aman, pasar akan sepi dan akan merugikan pedagang. Disisi lain, pedagang pun memerlukan situasi yang nyaman dan aman untuk berdagang.

3.3.7 Mobilisasi

Pasar sabtu memiliki 2 jalur jalan bagi pengunjung yang memiliki lebar jalan untuk dua orang dengan arah yang berbeda. Lebar jalan tersebut membuat lapak pedagang jalur tengah dapat diisi dengan 2 pedagang yang saling membelakangi. Penataan tersebut membuat pasar terlihat ramai dan berdesak-desakan serta mempersulit motor yang masuk ke dalam pasar. Hal itu juga menjadi teknik marketing pengunjung agar jalan lebih lambat dan memperlama pertimbangan mereka dalam membeli barang yang nampak di depan mata.

Saat pasar berdiri, lahan parkir hanya ada satu milik salah satu inti putda, ia menarik pengunjung untuk parkir disana dengan memarkirkan kendaraan teman-temannya agar terlihat penuh. Teknik tersebut berhasil menarik banyak orang untuk parkir disana. Hingga kini, sudah banyak lahan parkir yang sengaja dibuat dengan memanfaatkan lahan kosong atas izin pemilik tanah. Luas lahan parkir dapat meluas dengan izin kepada pemilik tanah. Lahan parkir selalu penuh, apalagi saat bulan ramadhan. Lahan parkir pasar sabtu diantaranya lahan parkir berada di jalur tengah ujung JL. Raya Laswi, jalur tengah ujung JL. Siliwangi, Masjid Al-Istiqomah, Rumah Makan Cip-Cip, seberang kanan masjid, seberang JL. Raya Laswi (RW 2), depan villa (pekerja villa), tanah kosong tanah warga, parkir mobil JL. Siliwangi, dan gudang proyek. Semua lahan parkir tersebut digunakan untuk memarkirkan kendaraan motor, kecuali parkir mobil JL. Siliwangi dan lahan parkir seberang JL. Raya Laswi (RW 2) yang dipakai untuk parkir motor atau mobil dan dapat meluas secara fleksibel, biasanya ada 20 mobil yang biasa parkir milik pedagang. Selain itu, lahan parkir gudang proyek yang digunakan khusus untuk parkir kendaraan motor dan mobil pedagang.

Terdapat beberapa lahan parkir yang memiliki sengketa, pertama, pada lahan parkir di jalur tengah depan JL. Siliwangi karena mulanya petugas parkir disana membuat parkir di seberang JL. Siliwangi tapi berpindah. Petugasnya sulit dilobi untuk ditiadakan lahan parkirnya karena ada faktor kekerabatan. Kedua, parkir mobil JL. Siliwangi yang legalitasnya masih belum jelas karena tiba-tiba membangun lahan parkir disana. Terakhir, tanah kosong warga yang meminta setoran ketika pergantian bendahara pasar.

Jarak antara lahan-lahan parkir tersebut tidak begitu jauh, sehingga mendukung petugas parkir pada masing-masing lahan untuk berebutan menarik pengunjung dengan petugas parkir lain. Terdapat beberapa teknik agar pengunjung parkir ke lahannya, yaitu dengan berteriak 'sini-sini-sini' sembari mendekati kendaraan yang hendak menuju tempat parkir ataupun berkata 'sini kosong pak, kalau kesini dapat gelas 3' sebagai iming-iming agar pengunjung parkir disana. Tantangan petugas parkir ialah kemacetan di depan lahan parkir, tepatnya di Jalan Raya Laswi disebabkan oleh angkot yang tiba-tiba berhenti. Hal ini menyulitkan masuk-keluarnya motor dari lahan parkir.

Parkir kendaraan di pasar sabtu menggunakan karcis parkir yang melambangkan legalitas. Apabila pengunjung ingin mengambil motor, dia harus mengembalikan karcis yang diberikan di awal, apabila karcis tidak ada, harus menunjukkan STNK untuk mencegah kehilangan motor. Apabila STNK nya tidak dibawa, diarahkan untuk membawa dahulu ke rumah dengan kendaraan umum. Setelah ia menunjukkan STNK, kendaraannya dapat dibawa pulang. Kertas karcis yang dipakai selama sehari kadang menghabiskan satu set karcis dan tidak pernah lebih karena karcis yang dikembalikan kepada petugas karcis dengan kondisi yang masih bagus dipakai kembali.

Karcis parkir seharusnya dikenakan juga kepada pedagang yang berdagang dengan kendaraan dan memarkirkan kendaraannya di lapak. Hal ini sudah pernah dikomunikasikan kepada pedagang tersebut, mereka memiliki alasan bahwa lahan parkir berada jauh dari lapak pedagang. Petugas sudah membuka tempat gudang proyek yang berada selang 2 rumah dari SDN Ciptawinaya untuk parkir kendaraan pedagang. Namun masih ada yang mengindahkan anjuran

ini karena pedagang tersebut merupakan pedagang lama yang sudah dekat dengan petugas dan memang sejak awal tidak ada retribusi parkir apabila memarkirkan kendaraan di lapaknya. Argumentasi pedagang pun didukung dengan mereka yang membayar retribusi lapak untuk menggunakan lahan dalam waktu tertentu.

Warga villa yang mengizinkan adanya pasar memberikan syarat untuk membuka akses jalan di tengah dari perumahan villa ke Jalan Siliwangi agar mempermudah mobilisasi. Pada kenyataannya, semakin banyak pedagang yang ingin berdagang, syarat ini dihiraukan dan warga villa pun beradaptasi. Sedangkan, bagi warga yang depan rumahnya berhadapan langsung dengan pasar masih dapat keluar rumah menggunakan motor meski harus berebutan jalan dengan pengunjung. Strategi warga biasanya memarkirkan kendaraan di lahan parkir meski harus bayar parkir. Sedangkan, bila hendak menggunakan mobil harus dikeluarkan dahulu ke tempat yang aman saat pasar belum dimulai atau pergi sejak pasar belum dimulai untuk singgah ke tempat lain sebelum ke tempat tujuan. Awalnya banyak protes warga terkait sulitnya mobilisasi keluar rumah, namun mereka dilobi dengan ditawarkan sebagai petugas pasar atau diberikan lapak berdagang. Namun, sulitnya akses mobil ini dikhawatirkan akan mempersulit akses jalan ambulance apabila ada warga yang mendadak harus dibawa ke rumah sakit. Antisipasi yang dimiliki petugas ialah dengan membuka jalur tengah dari rumah warga yang sedang sakit hingga jalan raya, meski memakan waktu.

Pihak SDN Ciptawinaya juga melakukan adaptasi dengan menutup gerbang utama SD yang didepannya terdapat lapak pedagang dan menggunakan pintu masuk samping. Selain itu, madrasah tidak terganggu dengan kegiatan pasar karena pelaksanaan kegiatan pengajian di sore hari. Sedangkan, usaha pemancingan, bengkel, praktik dokter, dan sebagainya mulai buka sejak siang hari karena menyesuaikan dengan pelaksanaan pasar sabtu.

3.3.8 Humas

Pasar yang erat dengan penarikan retribusi, berpeluang juga menjadi ladang sumbangan. Sumbangan yang biasanya ada di pasar ialah pengemis. Di pasar sabtu, selalu ada pengemis yang meminta izin kepada petugas dan petugas bertanya beberapa pertanyaan untuk memastikan bahwa ia memang pengemis, bukan orang berada yang berpura-pura menjadi pengemis. Lama berdirinya pasar juga menjadikan petugas sudah tahu mana saja pengemis yang benar-benar seorang pengemis dan bukan. Ketika mereka yang bukan pengemis datang, akan langsung diarahkan pergi dari pasar sabtu sembari diberi ceramah.

Disamping pengemis, ada kegiatan sumbangan yang dilakukan oleh seorang petugas dan pedagang kepada pedagang lain apabila ada pedagang yang meninggal, sakit parah, mengabarkan pernikahan, melahirkan, dan operasi rumah sakit. Kemudian, sumbangan uang dan barang menjelang 17 Agustus untuk kegiatan RW 1. Sebelumnya pernah ada kegiatan sumbangan dari RW sebelah yang membutuhkan dana pada kegiatan agustusan, mereka diarahkan untuk meminta izin ke pihak RT, RW, dan pengurus. Apabila ada orang luar yang ingin meminta sumbangan ke pasar sabtu, diarahkan untuk melapor ke petugas untuk dilihat legalitasnya melalui proposal, terkadang petugas menelepon nomor telepon yang tertera di proposal. Apabila sudah dipastikan benar akan diperbolehkan, dan sebaliknya apabila tidak benar akan dilarang untuk meminta sumbangan. Ada pula pihak-pihak tertentu yang tiba-tiba meminta sumbangan, mereka akan langsung diberhentikan oleh petugas. Kegiatan sumbangan yang masuk ke pedagang akan disaring terlebih dahulu dan melihat kondisi pedagang agar tidak terus-terusan mengeluarkan uang.

Melihat ramainya pasar sabtu, ada saja oknum-oknum yang meminta jatah dari penghasilan pasar. Petugas menyikapinya dengan melihat kontribusi mereka di pasar. Ketika tidak berkontribusi, petugas tidak akan mengalokasikan hasil pasar kepada oknum tersebut.

Ada petugas pasar yang meminta barang dagangan ke pedagang yang berkesan negatif. Ada pula petugas pasar yang tidak pernah meminta barang dagangan tapi pedagang langsung menyimpan sebungkus barang dagangan di motor petugas tersebut. Hal tersebut mendapat anggapan bahwa petugas yang diberi itu meminta barang dagangan ke pedagang.

4. Simpulan

Pengelolaan Pasar Sabtu di Kelurahan Manggahang merupakan inisiatif dari masyarakat setempat yang bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional pasar. Proses pengelolaan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk perizinan, pengelolaan petugas, pedagang, lapak, retribusi, hasil keuangan, kebersihan, keamanan, mobilisasi, dan hubungan masyarakat. Setiap aspek tersebut dikelola melalui interaksi yang kompleks antar aktor yang terlibat. Aktor-aktor yang berpengaruh dalam pengelolaan pasar ini meliputi ketua RW & RT, petugas pasar, dan Satpol PP, sedangkan aktor terlibat ialah warga, pedagang, dan pemilik warung yang memiliki pengaruh kurang kuat dalam memperjuangkan kepentingannya. Petugas pasar memiliki kepentingan untuk mendapatkan pendapatan bagi mereka sendiri melalui kebijakannya pada aktor yang terlibat. Pedagang dan pemilik warung perlu mengikuti pengelolaan yang diinisiasi oleh petugas dalam memperjuangkan mata pencahariannya. Sedangkan warga diarahkan untuk beradaptasi dengan kehadiran pasar yang diizinkan oleh aktor politik setempat. Setiap adanya perubahan atau pengelolaan baru melewati proses *interface* yang didalamnya penuh pertarungan negosiasi yang berkelindan dengan kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki masing-masing aktor.

Secara keseluruhan, pengelolaan Pasar Sabtu menunjukkan bagaimana aktor-aktor lokal dapat bekerja sama, meskipun dengan kepentingan yang berbeda, untuk menciptakan sistem pasar yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang pentingnya pendekatan berbasis aktor dalam pengelolaan pasar tradisional, serta bagaimana setiap aktor mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan pasar tersebut.

Referensi

- Aisy, K. R., Aflah, S. Z., Azkiawati, D., & Hantono, D. 2020. Pergerakan Pasar Kaget Rusunawa Marunda Jakarta Utara. *Border: Jurnal Arsitektur*, 2(1), 45-52.
- Binsar, B., & SD, Z. R. 2017. Partisipasi Pedagang Dalam Menjaga Ketertiban Pasar Kaget Minggu Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Doctoral dissertation*. Universitas Riau: Riau.
- Fakhriza, N. Z. 2017. Perubahan Kebijakan Ritual Grebeg Suro di Kabupaten Ponorogo dalam Teori Orientasi Aktor. *Jurnal Politik Muda*, 6(3), 171-179.
- Feriyanto. 2006. Menyoroti Pasar Tradisional. Yogyakarta: BP-Kedaulatan Rakyat.
- Geertz, C. 1963. *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesia Towns*. Chicago, The University of Chicago Press.
- Gerharz, E. 2018. The Interface Approach. IEE Working Papers: No.212.
- Gufon, A. 2014. Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Wisata 46 Dan Pasar Wisata Cibiru, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(2), 269-284.
- Long, N. 2001. *Development Sociology: Actors Perspectives*. London : Routledge.
- McDonald, R., & Macken-Walsh, A. 2016. *An Actor-Oriented Approach to Understanding Dairy*

- Farming in A Liberalised Regime: A Case Study of Ireland's New Entrants' Scheme. *Land Use Policy*, 58, 537-544.
- Muhsin, I., Shaleh, A.Q., & Amin, S. 2022. Keberadaan Pasar Tiban Jalan Lingkar Selatan Salatiga dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 9(1), 32-41.
- Nurhadi, H., Setiawan, D. R., Zahran, W. S., Tamba, R. S., & Hidayat, Y. R. 2023. Peningkatan Sosialisasi Pelayanan Publik Satu Pintu tentang Perijinan Usaha bagi Pedagang Usaha Mikro Pasar Kaget Pagi Jalan Elang Raya, Pondok Timur Indah, RT. 05/RW. 04, Kel. Mustikasari, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 31-38.
- Lehmann, U., & Gilson, L. 2013. Actor Interfaces and Practices of Power in A Community Health Worker Programme: A South African Study of Unintended Policy Outcomes. *Health policy and planning*, 28(4), 358-366.
- Listihana, W. D., & Arizal, N. 2020. Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Keberadaan Pasar Kaget di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. *Jurnal Daya Saing*, 6(3), 279-285.
- Saputra. O. G, Mutakin. A, L.Nurwulan. R. 2019. Peranan Pasar Kaget Dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kecamatan Ciparay Kab. Bandung. *GEOAREA/ Jurnal Geografi*, 2(1), 42-52.
- Shabraniti, Z. A., & Djabar, S. A. 2024. Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Tumpah Dadakan di Kelurahan Waru. *Journals of Social, Science, and Engineering*, 3(2), 280-284.
- Sinaga, S. 2017. Pengelolaan Pasar Kaget Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Di Kecamatan Sail. *Jurnal JOM FISIP*, 4(1).
- Sitoro, S. 2022. Analisis Tingkat Kepuasan Pengunjung Pasar Induk dan Pasar Dadakan (Pasar Tumpah) di Sangatta Utara. *Tinta Nusantara*, 8(1), 37-44.
- Spradley, J. 1980. *Participant Observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Styawan, A. D., & Rahman, M. T. 2021. Pola Pengelolaan Pasar Kaget dalam Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 11(2), 63-74.
- Swedberg, R. 2003. Bourdieu's Advocacy of The Concept of Interest and Its Role in Economic Sociology. *Economic Sociology: European Electronic Newsletter*, 4(2), 2-6.
- Thania, B. M., Sahar, K., Braniati, P. E., & Hantono, D. 2020. Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Pasar Kaget Rawasari Di Jakarta Pusat. *Jurnal Linears*, 3(1), 26-31.
- Turnbull, B., Hernández, R., & Reyes, M. 2009. Street Children and Their Helpers: An Actor-Oriented Approach. *Children and youth services review*, 31(12), 1283-1288.